

PERAN LPTK DALAM MENYIAPKAN TENAGA GURU SMK BIDANG AGRIBISNIS

Mukhidin¹ dan Dartum²

¹ Guru Besar FPTK-UPI

² Staf Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

ABSTRACT

The role of LPTK of High School Vocational Teacher of agribusiness field should be restructured the educational system and the curriculum offerings in agribusiness field. The reforms are also needed in assessment of needs analysis and broader cooperation. The LPTK should be able to redesign the curriculum of high school vocational teacher's candidate of agribusiness field related to the needs and development of agribusiness field and should be as the facilitator and mediator on the variety of agribusiness activity for the candidate and also High School Vocational Teacher of agribusiness field. Some of the approach that should be reviewed by LPTK should refer to the analysis result of the Ministry of Agriculture is aimed to the development of curriculum design, implementation model and the evaluation. Besides that the role of LPTK need to access the agribusiness curriculum materials as outlined in the course of Agribusiness. The High School Vocational Teacher in Agribusiness fields are play the strategic roles, the especially in shaping the entrepreneurial spirit in agribusiness fields and develop a comprehensive network of agribusiness and develop the potential of learners. Thus the LPTK roles are very essential in printing the educators, particularly vocational teacher candidates' agribusiness.

Keywords: *Agribusiness, High School Vocational Teacher of Agribusiness Field, LPTK*

ABSTRAK

Peran LPTK dalam menyiapkan tenaga guru SMK dalam bidang agribisnis harus merestrukturisasi sistem kependidikan dan sajian kurikulum bidang agribisnis. Pembinaan juga diperlukan dalam kajian analisis kebutuhan serta kerjasama yang lebih luas lagi. LPTK harus mampu meredesain kurikulum calon guru SMK bidang agribisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bidang agribisnis dan harus bersifat sebagai fasilitator dan mediator dalam berbagai kegiatan bidang agribisnis kepada calon dan guru SMK bidang agribisnis. Beberapa pendekatan yang harus dikaji oleh LPTK harus merujuk pada hasil analisis kementerian pertanian yang bertujuan untuk pengembangan desain kurikulum, model implementasi dan evaluasinya. Selain itu juga upaya LPTK perlu mengkaji materi-materi kurikulum agribisnis yang dituangkan dalam konten mata kuliah bidang agribisnis untuk. Guru SMK bidang agribisnis memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk jiwa kewirausahaan (enterprener agribisnis) dalam bidang agribisnis dan mengembangkan jaringan agribisnis secara komprehensif serta mengembangkan potensi peserta didiknya. Dengan demikian peran LPTK sangat esensial dalam mencetak tenaga pendidik, khususnya calon guru SMK bidang agribisnis.

Kata Kunci : *Agribisnis, Guru SMK bidang Agribisnis, LPTK*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang dan semua satuan pendidikan ditentukan oleh faktor guru, disamping perlunya unsur-unsur penunjang lainnya. Kualitas kemampuan guru yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Sedangkan derajat kemampuan guru sejak mula disiapkan pada suatu lembaga pendidikan guru yang ditangani oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), baik

secara berjenjang maupun secara keseluruhan. Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) merupakan lembaga penghasil tenaga edukasi (guru) di Indonesia, yang sangat berperan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Kebutuhan guru bagi sekolah negeri maupun swasta dapat diprediksi secara tepat, dengan demikian pemerintahpun dapat menghasilkan tenaga pendidik yang selektif serta berkualitas.

Kualitas atau mutu adalah merupakan suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas kualitas dan mutu dapat diartikan sebagai *agregat* karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan dari kemasakan lulusan tersebut. Dalam prakteknya LPTK kurang memperhatikan sistem penjamin mutu internal perguruan tinggi tersebut, sebagaimana yang dirumuskan kementerian pendidikan nasional. Rumusan Kemendiknas (2010:8) bahwa sistem penjamin mutu internal (SPMI) bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas dan PP No.19 tahun 2005 tentang NSP. Dalam pendidikan, mutu atau kualitas adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan kepada pelanggan sebagai penerima produk dan jasa atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.

Oleh karena itu LPTK dapat memberikan sumbangsih sebesar-besarnya bagi tercapainya kondisi tinggal landas bagi sekolah kejuruan dalam bidang agribisnis melalui dikuasainya trilogi profesi oleh para pendidik bidang agribisnis secara komprehensif, serta dikemasnya pengelolaan satuan pendidikan melalui pengelolaan pendidikan berbasis kinerja oleh tim pengembang kurikulum dan pembelajaran bidang agribisnis.

Permasalahan yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah ialah hampir tidak terdapat pendidikan tenaga guru yang bebas secara terbuka untuk mengoprasionalkan beberapa program studi, akan tetapi tidak memperhatikan aspek kebutuhan lapangan. Hasil analisis yang perlu dijalankan ialah seluruh universitas penyelenggara kependidikan, LPTK termasuk perguruan tinggi pemilik Fakultas Kependidikan diminta untuk menjalin kerjasama yang intens dan terus menerus dengan pemerintah daerah dalam pemetaan/perbaikan mutu pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan peran dan fungsi LPTK ini sebenarnya bukan menjadi permasalahan, akan tetapi produk LPTK sebagai penghasil guru tidak terencana secara baik oleh pemerintah dalam berbagai jenjang pendidikan. Peningkatan tenaga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) khususnya dalam bidang agribisnis perlu mendapat perhatian khusus dari

perbagai kalangan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Hamalik (2007) bahwa keberhasilan belajar-mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi guru. Guru sebagai orang yang berkewajiban merencanakan pembelajaran (*instruction planning*) selalu mengacu kepada komponen-komponen kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, bahwa Guru SMK bidang agribisnis mempunyai tugas pokok yang sama seperti guru-guru lain : (a) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bidang agribisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (b) membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat; (c) melaksanakan tugas profesional lain dan administratif rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama tersebut. Aktifitas proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru sebagai salah satu pemegang utama di dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, oleh sebab itulah tanggung jawab keberhasilan pendidikan berada di pundak guru.

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional pada bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka profesionalisme guru SMK bidang agribisnis dalam pencapaian tujuan pendidikan utamanya pada skala tingkat institusional dan nasional perlu adanya pelatihan dan profesionalisme guru khususnya dalam bidang agribisnis, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang bisa dijadikan masukan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan terutama pada tingkat sekolah dasar sampai menengah baik negeri maupun swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di lingkungan Universitas, IKIP, STKIP, Fakultas/

Jurusan Tarbiyah dan atau Keguruan pada UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan PTIS maupun organisasi-organisasi keguruan seperti PGRI dan MGMP ialah untuk mendidik, membina, melatih, mengorganisasikan agar lahir sosok guru yang profesional mutlak dilakukan. Dengan maksud tersebut maka perlu adanya upaya mewujudkan pengembangan mutu akademik LPTK untuk melahirkan sosok guru SMK profesional dalam bidang agribisnis secara kontinuitas. Standar pertama menyangkut kualifikasi kependidikan guru. hal ini berkaitan langsung dengan fungsi dan peran LPTK, yang senantiasa berupa untuk mengembangkan keilmuan dan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mempersiapkan calon guru dan calon tenaga kependidikan, serta memberikan layanan dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja, hingga kualifikasi pendidikan minimal profesi terpenuhi.

Upaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru SMK bidang agribisnis dewasa ini mendapat penghargaan yang utama dalam sistem kenaikan pangkat/jabatan guru. Dimana perolehan ijazah tambahan dikelompokkan dalam unsur utama dan pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran serta dalam bidang pengembangan keahlian tertentu. Jika hal ini didukung oleh kerjasama yang baik antara LPTK dan jajaran birokrasi kanwil depdikbud dan dinas dikbud ditambah dengan sistem pembinaan karier yang jelas maka akselerasi profesionalisasi jabatan guru secara bertahap akan dapat ditingkatkan.

Tanggungjawab dan Peran LPTK

Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab dan peran bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah

di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah tetapi jika kesejahteraan guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak heran kalau guru-guru di negara maju kualitasnya tinggi atau dikatakan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi. Maka tanggungjawab dan peran LPTK dalam menyiapkan tenaga pendidikan khususnya pada SMK bidang agribisnis harus terus ditingkatkan sebaik mungkin.

Guru SMK bidang agribisnis memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk jiwa kewirausahaan (enterprener) dan mengembangkan pendidikan bidang agribisnis secara komprehensif serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi bidang agribisnis untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan bidang agribisnis, tentunya guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ranah tujuan LPTK hendaknya harus mengikuti perkembangan program studi yang ada diberbagai jenjang pendidikan. Dalam hal ini pendidikan menengah kejuruan yang sering kali kurang mendapat perhatian oleh pihak pemerintah dari segi pemenuhan tenaga pendidikan dalam program agribisnis.

Salah satu implikasi perkembangan pendidikan ialah dengan pesatnya program studi yang dulu jarang peminatnya namun sekarang menjadi pokok perhatian dan banyak peminat untuk mendalami dan mengambil program tersebut. Hal ini masih kurang menjadi bahan perhatian LPTK dalam pemenuhan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kualifikasi pengalaman dan keterampilan/skill yang baik. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi LPTK untuk mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, dengan strategi dan peningkatan mutu LPTK.

Dalam menggerakkan segala kemampuan di dalam lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai mutu. LPTK diharapkan mampu memperluas jaringan kerjasama tidak hanya dengan lembaga-lembaga kerja kependidikan, tetapi juga nonkependidikan seperti DU/DI dan perusahaan penda (pemerintah daerah). Pendidikan vokasional diberikan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal khususnya dalam bidang agribisnis dengan tujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam pemenuhan dunia agribisnis yang kental dengan latar belakang mata pencaharian penduduk pada umumnya. Pendidikan kejuruan dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang dan menurut struktur programnya. Pengelompokan berdasarkan jenjang dapat didasarkan atas jenjang kecanggihan keterampilan yang dipelajari atau jenjang pendidikan formal yang berlaku. Jenjang pendidikan formal yang berlaku dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (*secondary*) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian.

Langkah Konkrit LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Agribisnis

Untuk mendapatkan mutu dan hasil bidang pendidikan yang baik dalam bidang pendidikan agribisnis, ada 4 (empat) usaha dasar/pokok yang harus dilakukan oleh LPTK antara lain :

Pertama harus terus menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini antara pimpinan LPTK dengan staf harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Kedua, Perlunya ditumbuh kembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu pendidikan. Setiap orang dalam LPTK harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya dalam bidang agribisnis yang terdapat dalam program pendidikan keahlian di SMK, mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan yakni DU/DI. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu dalam pendidikan harus dimengerti bukanlah

sebagai suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus. Untuk itu LPTK harus terus mengusahakannya dengan jalan melakukan kerjasama dalam berbagai elemen.

Ketiga, LPTK dalam menggerakkan segala kemampuan di dalam lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai mutu dalam bidang agribisnis termasuk di dalamnya kerjasama dengan kementerian pertanian untuk memfasilitasi tenaga-tenaga ahli dalam bidang agribisnis secara komprehensif. Janganlah diantara mereka justru terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka haruslah menjadi satu kesatuan yang bekerjasama saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan. LPTK harus siap untuk memberikan kontribusi positif dalam perjalanan program keahlian bidang agribisnis.

Keempat, LPTK dalam pengembangan program pendidikan kejuruan dalam bidang agribisnis harus memperhatikan lima kategori pengembangan gurunya sebagai pelaksana harian yang dibekali berbagai pengetahuan mengenai (1) program pengarahan kerja (*pre vocational guidance education*), (2) program persiapan kerja (*employability preparation education*), (3) program persiapan bidang pekerjaan secara umum (*occupational area preparation education*), (4) program persiapan bidang kerja spesifik (*occupational specific education*), dan (5) program pendidikan kejuruan khusus (*job specific education*).

Langkah yang harus dikembangkan oleh LPTK sebagai perannya dalam menyiapkan tenaga pendidik (guru SMK) bidang agribisnis harus mampu menyiapkan desain kurikulum dan model implementasinya secara jelas. Langkah yang bisa dianalisis adalah sebagai berikut:

Pertama, pada program pengarahan kerja, LPTK memberikan pengetahuan dasar dan umum tentang berbagai jenis pekerjaan di masyarakat sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap berbagai pekerjaan tersebut, sedangkan pada program persiapan kerja, sekolah memberikan dasar-dasar sikap dan keterampilan kerja, meskipun masih bersifat umum. Dengan program ini diharapkan peserta didik (calon guru) mempunyai peluang yang lebih besar

untuk mendapatkan pengetahuan pengembangan pekerjaan bidang agribisnis.

Kedua, pengembangan program persiapan bidang pekerjaan secara umum dalam bidang agribisnis, LPTK memberikan bekal kepada mahasiswa calon guru bidang agribisnis untuk meningkatkan kemampuan bekerja untuk bidang pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, peralatan yang sejenis. Dengan program ini diharapkan peserta didik mempunyai pilihan lapangan pekerjaan yang lebih jelas dan lebih cepat mengikuti latihan di dalam pekerjaan. Program persiapan kerja yang spesifik memberikan bekal yang sudah mengarah kepada jenis pekerjaan tertentu, meskipun belum pada suatu perusahaan tertentu. Lebih khusus lagi adalah program pendidikan kejuruan khusus yang sudah terarah pada pekerjaan khusus, yaitu mendidik siswa untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh suatu perusahaan tertentu.

Ketiga, perjenjangan kedekatan pendidikan kejuruan terhadap kesiapan lulusan dalam memasuki lapangan kerja bidang agribisnis. Makin khusus jenis pendidikan kejuruan akan makin siap lulusannya memasuki lapangan kerja, tetapi juga makin sempit bidang pekerjaan yang dapat dimasuki. Walaupun demikian, kecuali untuk keperluan tertentu pendidikan kejuruan yang khusus dalam bidang agribisnis (*job specific education*) maka diperlukan keahlian khusus dalam bidang tersebut secara maksimal.

Keempat, kesiapan mental untuk mengembangkan dirinya serta keterampilan dasar dalam bidang agribisnis untuk setiap kali dapat menyesuaikan diri kembali pada perubahan tertentu (*retrain ability*). Dengan bekal tersebut diharapkan tenaga pendidik di sekolah menengah kejuruan dalam bidang agribisnis tidak hanya terpancang pada jenis pekerjaan yang ada, tetapi juga terdorong untuk mewujudkan lapangan kerja baru dengan mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya secara optimal. Dengan demikian konteks pendidikan formal (sekolah kejuruan) seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi siap latih yang kemudian diteruskan dengan program pelatihan, baik di dalam industri atau lembaga pelatihan tertentu dalam bidang agribisnis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga Kependidikan di SMK Bidang Agribisnis

Pendidikan vokasional bidang agribisnis merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dalam kajian agribisnis dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasional, terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (*apprenticeship of learning*) baik dalam bidang industri maupun teknologi pangan dan pertanian, serta kejuruan-kejuruan khusus (*specific trades*) sebagai bekal untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara komprehensif. Menurut Nelson (2000:4) bahwa

Vocational education prepares students for manufacturing jobs include trade and industry programs, such as construction, mechanics and repair, precision production, and transportation and material moving. Vocational programs that prepare students for jobs in the services and information industries include health care and technology and communications, among others..

Suatu pendidikan yang memberikan pengalaman, stimulus visual, pengetahuan afektif, informasi kognitif, atau keterampilan psikomotor, mempertinggi penyelidikan pengembangan vokasional serta menciptakan dan memelihara sendiri dalam dunia kerja. Pendidikan vocational dilaksanakan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal, terampil untuk menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, dalam hal ini LPTK dapat memberikan sumbangsih sebesar-besarnya bagi tercapainya kondisi tinggal landas bagi sekolah kejuruan khususnya melalui dikuasainya trilogi profesi oleh para pendidik, serta dikemasnya pengelolaan satuan pendidikan melalui pengelolaan pendidikan berbasis kinerja. Menurut Sukmadinata (2004:61) bahwa pendidikan vokasi difokuskan pada mempelajari atau melatih kecakapan-kecakapan praktis, keterampilan-keterampilan yang berkenaan dengan penyelesaian tugas pekerjaan atau kompetensi-kompetensi kerja. Penyiapan tenaga kependidikan dalam bidang agribisnis, LPTK harus memperhatikan pendekatan dalam pengembangan agribisnis tersebut secara komprehensif.

Menurut Lusdianto (2006:30) bahwa agribisnis merupakan akumulasi konsep pengembangan pertanian kedalam bidang agribisnis, proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pelatihan dan uji coba. Pengembangan

agribisnis sebagai suatu sistem agribisnis merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Agribisnis terdiri dari dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas. LPTK dalam menyiapkan tenaga kependidikan di SMK Bidang Agribisnis harus memasukan beberapa kajian mata kuliah yang di dalamnya mencakup beberapa kajian (1) subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan menyalurkan sarana produksi ; (2) subsistem usaha budidaya usahatani (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saprodi untuk menghasilkan produksi primer; (3) subsistem agribisnis hilir (*down tream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan yang siap dikonsumsi; (4) subsistem pemasaran (*marketing agribusiness*) kegiatan memasarkan hasil pertanian primer dan produk olahannya. Subsistem input (sarana produksi) berkenaan dengan industri dan distribusi sarana produksi seperti lahan, pupuk, benih, pestisida alsistan. Maka semua usaha yang berkaitan dengan sarana produksi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan sektor agribisnis dalam konteks penyiapan tenaga pendidik dalam bidang agribisnis.

LPTK dalam upaya menyiapkan tenaga pendidik di SMK dalam bidang agribisnis harus mempunyai desain kurikulum yang memicu terhadap penggalan keilmuan-keilmuan dalam bidang agribisnis secara parsial yang disesuaikan dengan tema-tema tertentu. Pokok keilmuan yang harus disiapkan oleh LPTK untuk guru SMK dalam bidang agribisnis antara lain, (1) Subsistem Pengolahan. Subsistem ini meliputi sekumpulan pengetahuan mengenai semua kegiatan untuk mengubah bentuk dan peningkatan nilai tambah produksi pertanian termasuk pengepakan, pengendalian mutu hasil dan pengolahan hasil. Sesuai dengan pohon industri sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat. (2) Subsistem Pemasaran. Sistem ini berkenaan dengan pengetahuan semua kegiatan/usaha yang terkait dalam proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen akhir dalam sektor agribisnis. Di dalamnya termasuk kegiatan pergudangan, transportasi, jasa ekspor-

impor, distribusi, akreditasi, standarisasi dan pengembangannya. Pengetahuan pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan, keadaan pasar heterogen. Berdasarkan hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar (konsumen), sehingga dengan berubahnya paradigma tersebut, maka pengetahuan yang lengkap dan rinci tentang preferensi konsumen pada setiap wilayah, negara, bahkan etnis dalam suatu negara, menjadi sangat penting untuk segmentasi pasar dalam upaya memperluas pasar produk-produk agribisnis yang dihasilkan.

Selain itu diperlukan juga pemetaan pasar (*market mapping*) yang didasarkan preferensi konsumen, yang selanjutnya digunakan untuk pemetaan produk (*product mapping*). Selain itu juga bisa dikembangkan strategi pemasaran modern seperti strategi aliansi antar produsen, aliansi produsen-konsumen, yang didasarkan pada kajian mendalam dari segi kekuatan dan kelemahan. (3) Subsistem Pendukung. Meliputi kumpulan pengetahuan dalam kegiatan/usaha yang mendukung seluruh atau sebagian dari empat subsistem agribisnis lainnya. Kegiatan ini meliputi : penelitian dan pengembangan, pengembangan mutu SDM, kelembagaan dan kemitraan, investasi dan permodalan, asuransi. Cakupan agribisnis yang demikian luas dapat menjadi penggerak perekonomian nasional, terutama karena pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya domestik yang paling potensial berkenaan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. (4) Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil. Lingkup kegiatan meliputi sekumpulan pengetahuan mengenai aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah *value added* (nilai tambah) dari produksi primer tersebut.

Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pengeksktraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu. Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan

komoditas pertanian sebagai bahan baku (input) bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri. Sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku (input) lain diluar komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dll. Dalam mengembangkan agroindustri, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh agroindustri penunjang lain seperti industri pupuk, industri pestisida, industri bibit/benih, industri pengadaan alat-alat produksi pertanian dan pengolahan agroindustri seperti industri mesin perontok dan industri mesin pengolah lain.

Guru di SMK dalam bidang agribisnis harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi dalam bidang agribisnis yaitu komponen dasar keilmuan, komponen substansi profesi dan komponen praktik profesi. Di samping itu, pengelolaan pendidikan (SMK) diharapkan mampu memberdayakan para pendidik yang profesional dalam bidang agribisnis, untuk menyelenggarakan tugas keprofesionalannya sesuai dengan trilogi profesi masing-masing. Komponen pertama adalah ilmu pendidikan (komponen dasar keilmuan). Komponen ini memberikan landasan bagi calon tenaga pendidik profesional, sehingga mereka memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi pendidik. Dalam hal ini, pendidik diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam implementasi pembelajaran agribisnis secara komprehensif.

Komponen selanjutnya adalah substansi profesi yang membekali calon pendidik profesional berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dalam bidang agribisnis, serta objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya yakni mengembangkan pendidikan kejuruan agribisnis. Komponen ini berintikan proses pembelajaran materi mata pelajaran yang merupakan bagian kurikulum satuan pendidikan (untuk guru), atau proses pembelajaran pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir (untuk konselor). Komponen praktik mengarahkan calon tenaga pendidik profesional untuk menyelenggarakan praktik bidang agribisnis secara profesional dan profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam hal ini komponen praktik profesi pendidik adalah

penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan. Ini dapat dilakukan melalui modus pengajaran materi pelajaran (untuk guru), atau proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling (untuk konselor). Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi, setelah program dan pendidikan.

Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Guru SMK Bidang Agribisnis

Perkembangan pendidikan dan kebijakannya menuntut pemerintah sendiri menyiapkan strategi dalam upaya pemberdayaan dan implementasi peraturan terhadap kualitas guru pada umumnya. Pemerintah telah berhasil menetapkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Semua standar tersebut harus dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (*educational stakeholder*). Salah satu standar dari delapan standar tersebut adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Khusus standar pendidik telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam Permen Diknas ini ditetapkan bahwa setiap guru harus memiliki kualifikasi minimum S-1 dan D-4 serta memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai standar pendidik tersebut.

Upaya-upaya tersebut meliputi, (1) Membuat peraturan bagi guru-guru untuk menyelesaikan studinya pada jenjang sarjana (S1) yang sesuai dengan program studi latar belakangnya. (2) Mengembangkan jaringan pendidikan bidang agribisnis dengan berbagai universitas ternama. (3) Memberikan fasilitas beasiswa untuk guru bidang agribisnis yang belum mempunyai kualifikasi pendidikan S.1 bidang agribisnis. (4) Membuka program-program khusus/keahlian dalam bidang agribisnis bagi di sekolah (SMK) yang belum memiliki program tersebut, dan memberikan program pelatihan/workshop bagi seluruh guru-guru dalam bidang agribisnis untuk peningkatan sumber daya manusia. (5) Strategi

dan upaya lainnya yang harus dilakukan LPTK adalah perbaikan sistem seleksi mahasiswa baru, optimalisasi pembentukan kemampuan mengajar melalui penyelenggaraan kerja praktik, pembentukan unit kendali mutu di tingkat fakultas, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, perlu juga memperhatikan peningkatan fasilitas, sumber daya manusia (tenaga pengajar), aspek penunjang, dan terakhir manajemen yang kuat.

LPTK Harus Menyiapkan Desain Kurikulum Agribisnis

Agribisnis dipahami sebagai bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya merupakan inti (core) agribisnis, meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Ruang lingkup “agribisnis” tidak terlepas dari sektor pertanian, dengan demikian pihak LPTK harus mempersiapkan desain kurikulum

untuk mempersiapkan tenaga kependidikan dalam bidang agribisnis secara maksimal. Konteks agribisnis merupakan langkah “taktis” lanjutan usaha untuk menaikkan atau mengembangkan nilai guna atau manfaat lebih dari hasil pertanian. Sektor agribisnis dalam ruang lingkup ekonomi masa kini mencakup berbagai macam usaha komersial, dengan menggunakan kombinasi “heterogen” dari tenaga kerja, bahan, modal dan teknologi. Selain itu juga agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi para petani, dan memasarkan, memproses serta mendistribusikan produk usaha tani kepada pengguna atau konsumen. Sektor agribisnis merupakan lahan yang sangat “potensial” bagi pertumbuhan perekonomian nasional, karena sektor ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari tingkat petani, produksi maupun tingkat pemasaran.

Selama ini peran LPTK dalam menyiapkan tenaga kependidikan dalam bidang agribisnis masih kurang serius karena sektor agribisnis sangat terpinggirkan oleh sektor industri, karena dianggap sektor yang tidak “komersial” dan belum “produktif”. Jika kita lihat potensi sumber daya alam kita serta sumber daya manusia, sangat mungkin bagi kita untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas sektor agribisnis. Coba kita bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap lini yang menggerakkan sektor ini, mulai dari petani sebagai kegiatan hulu, pekerja sampai tenaga pemasaran produk. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memajukan sektor agribisnis. Peningkatan pendapatan ekonomi rakyat sangat mutlak dilakukan, karena hal ini menunjang kelangsungan hidup rakyat khususnya dan negara pada umumnya. Peningkatan ekonomi rakyat akan secara “linier” berpengaruh terhadap perekonomian nasional, ketika ekonomi rakyat kuat dan tinggi maka perekonomian negara akan sangat kuat, karena secara fundamental perekonomian negara ini didukung oleh perekonomian rakyat.

Desain kurikulum yang harus dipersiapkan oleh LPTK ialah harus berorientasi pada perubahan paradigma penyelenggaraan transmigrasi yang berorientasi pada pengembangan agribisnis didukung oleh kebijakan pengembangan komoditas pertanian tertentu dalam skala besar sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Pengembangan komoditas tersebut hendaknya

mampu menciptakan nilai tambah dan berorientasi pada keuntungan. Disamping itu pendekatan kecukupan pangan yang berorientasi pada produksi hendaknya bergeser menjadi keamanan pangan yang berorientasi pada ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Ketersediaan pangan itu sendiri dapat didekati dengan kombinasi antara diversifikasi pangan, pengembangan jenis pangan baru, produksi pangan dan impor pangan serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan bernilai tambah tinggi.

Pendekatan desain kurikulum yang harus dirumuskan oleh LPTK dalam mempersiapkan tenaga kependidikan di SMK dalam bidang agribisnis harus merumuskan beberapa pendekatan materi kurikulum yang meliputi kebijakan distribusi produksi agribisnis yang diarahkan untuk mencapai kinerja pemasaran yang optimal, dengan memasukkan elemen-elemen sebagai berikut: (1) Melengkapi informasi pasokan dan kebutuhan produk agribisnis dalam sistem distribusi. (2) Memantapkan pembentukan harga melalui interaksi antara jumlah pasokan dan kebutuhan. (3) Mempersiapkan fasilitas bangunan dan sarana pemasaran lainnya sesuai dengan daya simpan produk. (4) Memisahkan kegiatan pemasaran dari kegiatan distribusi fisik komoditi-komoditi agribisnis tersebut. (5) Mengamankan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan menjamin kondisi produk agribisnis yang baik.

Beberapa rumusan kompetensi agribisnis yang harus dirumuskan oleh LPTK dalam menyiapkan tenaga kependidikan di SMK bidang agribisnis meliputi kriteria rumusan kompetensi antara lain: (1) Adanya komoditi yang dipasarkan untuk mendukung peluang pasar, sesuai dengan agroekologi dan memberikan kepuasan tertinggi secara ekonomi dan sosial bagi rumah tangga petani, masyarakat dan wilayah yang bersangkutan. (2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi melalui efisiensi biaya transportasi input produksi dan komunikasi (dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi). (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran melalui efisiensi biaya transportasi dan komunikasi dalam memperoleh promosi, dapat menekan susut dan menjamin stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya serta memperkuat posisi tawar petani. (4) Dapat menangani berbagai aspek pada phase pasca panen sesuai dengan

kebutuhan pelaku agribisnis dan dapat melakukan fungsi pelayanan pemasaran produk agribisnis secara lebih efisien. (5) Meningkatkan jangkauan pelayanan umum seperti pasar, bank, sekolah, puskesmas, kantor pos maupun telekomunikasi. (6) Melahirkan sistem transit dalam skala bisnis dan diharapkan berperan dalam proses agribisnis dengan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait (produsen, pedagang dan konsumen). (7) Petani dapat menimba informasi agribisnis termasuk peluang pasar, perubahan selera konsumen, harga dan permintaan. (8) Mempunyai dukungan kebijakan pemerintah, terutama dalam penyediaan insentif berupa penyediaan infrastruktur dan kebijakan fiskal.

SIMPULAN

Salah satu fokus penting dari pendekatan agribisnis adalah penyiapan desain kurikulum dan tenaga kependidikan oleh LPTK dalam mengembangkan tujuan pendidikan bidang agribisnis tersebut. Upaya penyiapan tenaga kependidikan bidang agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat pembangunan pertanian secara keseluruhan. Agribisnis sebagai suatu sistem merupakan hasil perpaduan subsistem-subsistem berikut (1) subsistem input, (2) subsistem usaha tani/produksi (3) subsistem pengolahan dan pemasaran, dan didukung oleh (4) subsistem sarana pendukung fasilitas. Disamping itu pendekatan agribisnis dalam pembangunan pertanian tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa memperhatikan aspek lingkungan dari wilayah yang akan dikembangkan. Dalam arti kata bahwa mutlak diperlukan mekanisme keterpaduan antara pembangunan pertanian pendekatan agribisnis dan pembangunan wilayah secara umum, sehingga di-hasilkan satu sinergi yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi LPTK dalam menyiapkan calon tenaga pendidik dalam bidang agribisnis harus selalu melakukan koordinasi dengan kementerian pertanian dan perdagangan, karena unsur-unsur yang terkandung dalam pengembangan desain kurikulum agribisnis tidak terlepas dari hasil analisis kebutuhan oleh kementerian tersebut. Pendekatan yang dibangun ialah dengan meningkatkan kesejahteraan produksi padi nasional yang mencakup kajian: (1) mendorong sinergi antarsubsistem agri-

bisnis; (2) meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya, modal, teknologi, dan pasar; (3) mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi baru; (4) memberikan insentif berusaha; (5) mendorong diversifikasi produksi; (6) mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder; (7) pemberdayaan petani dan masyarakat; (8) pengembangan kelembagaan (kelembagaan produksi dan penanganan pascapanen, irigasi, koperasi, lumbung pangan desa, keuangan dan penyuluhan). Maka LPTK harus lebih tanggap terhadap permasalahan di atas dalam upaya menyiapkan tenaga kependidikan dalam bidang agribisnis di SMK secara komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Crunkilton, John. R., Curtis Finch (1999). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Finch, Curtis R. (1979). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*. Sydney London : Allyn and Bacon Inc.
- Finlay, Ian, et.al. (1996). *Changing Vocational Education and Training*. London and New York: Routledge.
- Hamalik, Oemar (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemendiknas, Dikti. (2010). *Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lusdianto, Wely (2006). *Kumpulan Sari Pertanian: Jilid Satu*. Jakarta : CV Aneka Ilmu.
- Nelson, Dawn. (2000). *Vocational Education in United States : Toward the Year 2000*. USA : Office of Educational Research and Development. Departement of Education.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Kurikulum & Pembelajaran Kompetensi*. Bandung : Yayasan Kesuma Karya.